

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian dan jurnal mengenai Efektivitas Program maupun yang pernah dilakukan dan relevan dengan topik penelitian ini antara lain:

1. **Norsa`adah (2024)** dalam penelitiannya yang berjudul **“Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Pengembangan Kewirausahaan Pemuda pada Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Balangan”**. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implemantasi pengembangan kewirausahaan pemuda di Kabupaten Balangan serta faktor apa saja yang mempengaruhinya. Faktor yang mempengaruhi meliputi faktor penghambat yakni sasaran kebijakan belum tepat, koordinasi antara petugas dengan masyarakat yang kurang baik, kondisi sosial masyarakat kurang baik, kemudian faktor pendorong meliputi informasi masyarakat yang menjadi kandidat penerima bantuan tergolong baik dan dukungan pemerintah Kabupaten Balangan dengan dukungan dan kerjasama. Hasil penelitian menyatakan pengembangan kewirausahaan pemuda sudah baik dari aspek: tujuan atau sasaran kebijakan yang jelas dan konsisten meliputi kejelasan tujuan dan sasaran program sudah baik dan ketepatan sasaran kurang baik; dukungan teori yang kuat dalam merumuskan kebijakan meliputi dasar perumusan kebijakan sudah baik, dasar yang jelas dalam perumusan kebijakan yang sudah baik; proses implementasi memiliki dasar hukum jelas meliputi adanya dasar hukum baik; komitmen kerja yang baik dan

keahlian petugas kurang baik; dukungan para *stakeholder* meliputi dukungan pemerintah dan instansi terkait sangat baik; stabilitas kondisi sosial, ekonomi dan politik meliputi kondisi sosial masyarakat kurang baik, kondisi ekonomi masyarakat kurang baik, kondisi politik tergolong baik, sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 8 Tahun 2021 Pengembangan Kewirausahaan Pemuda pada Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Balangan.

2. **Luki Oka Prastio (2023), dalam penelitiannya yang berjudul “Memantik Wirausaha Muda di Kota Industri (Studi Peran Pemerintah Daerah Melalui Program Wirausaha Muda Pemula di Kabupaten Bekasi)”.**

Penelitian ini di latar belakang upaya pemerintah dalam meminimalisir kompleksitas permasalahan kepemudaan seperti kurangnya partisipasi angkatan kerja pemuda, lemahnya kemampuan kewirausahaan, belum serasinya kebijakan kepemudaan di tingkat nasional maupun daerah, dan tingginya tingkat pengangguran terbuka pemuda di Kabupaten Bekasi di samping segudang patologi sosial lainnya di kalangan pemuda. Penelitian ini menggunakan basis analisis peran pemerintah dari Diva (2009) terdiri dari peran regulator, peran fasilitator dan peran katalisator. Tujuan penelitian ini menganalisa peran pemerintah daerah melalui Program Wirausaha Muda Pemula di Kabupaten Bekasi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, kemudian teknik perolehan data menggunakan studi pustaka, observasi, wawancara. Hasil penelitian menunjukkan peran pemerintah daerah melalui Program Wirausaha Muda Pemula belum optimal. Ditinjau berdasarkan peran regulator yang belum mampu

menciptakan iklim yang kondusif termanifestasi dari kuota kepesertaan yang sangat sedikit yang diperburuk rendahnya minat wirausaha. Berdasarkan peran fasilitator masih belum adanya akses permodalan dan pendampingan. Terakhir ditinjau dari peran katalisator, dilakukan melalui pemberian pengetahuan dan motivasi, namun terdapat kekurangan seperti lemahnya pemberdayaan, tidak adanya pemberian penghargaan, serta dampak keberlanjutan program yang masih dipertanyakan.

3. **Annis Sylvia** (2023), dalam penelitiannya yang berjudul **“Efektivitas Pelaksanaan Program Kartu Identitas Anak (KIA) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Timur”**.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan datanya menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Sumber data diambil melalui penarikan sampel dengan cara *purposive sampling* berjumlah 12 orang informan. Setelah data terkumpul, kemudian dianalisis dengan teknik reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Lalu diuji kredibilitas datanya dengan cara meliputi perpanjangan pengamatan, meningkatkan ketekunan, triangulasi, menggunakan bahan referensi, dan mengadakan *membercheck*. Hasil dari penelitian menunjukan bahwa efektivitas pelaksanaan program KIA belum efektif. Pertama, dilihat dari aspek keberhasilan program dengan indikator pelaksanaan kurang efektif karena pelaksanaan yang dilakukan hanya berupa jemput bola tetapi sosialisasi belum dilaksanakan. Kedua, pada keberhasilan sasaran dengan indikator realisasi belum efektif yang mana menghitung jumlah anak yang memiliki KIA lebih rendah dari pada

anak yang memiliki KIA. Ketiga, pada kepuasan terhadap program dengan indikator kepuasan yang dirasakan belum efektif karena masih ada masyarakat yang belum tahu fungsi KIA. Keempat, pada pencapaian target program belum efektif karena yang ditargetkan anak yang bersekolah setingkat SD dan TK saja, sedangkan SLTP dan SLTA tidak. Kelima, pada pencapaian tujuan menyeluruh dalam indikator melaksanakan tugas belum efektif karena pada bagian saran dan prasarana masih belum lengkap, dan dalam indikator penilaian belum efektif karena masih belum adanya penilaian dalam program KIA ini, serta ada indikator efektivitas organisasi kurang efektif karena masih kurangnya partisipasi masyarakat serta sosialisasi yang masih belum dilaksanakan secara merata kepada masyarakat. Sehingga untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan Program KIA diharapkan agar Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Timur lebih aktif mengadakan sosialisasi tentang KIA, menambahkan atau setidaknya menggantikan komputer yang sudah tidak bisa terpakai lagi untuk berbagai pelayanan baik itu KIA maupun pelayanan lainnya dan lebih cepat tanggap dalam mengkoordinasikan sistem jaringan pada pusat agar proses pencetakan pada berbagai program baik dari pelayanan KIA maupun pelayanan lainnya tidak terganggu.

Berdasarkan penelitian terdahulu, penelitian yang akan dilakukan oleh penulis masih dengan topik serta permasalahan yang tidak jauh berbeda dengan penelitian sebelumnya. Selain topik penelitian yang dilakukan penulis menurut sepengetahuan penulis jarang diusulkan sebelumnya pada Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai, penelitian yang dibuat penulis ini juga memiliki

kelebihan dimana teori efektivitas menurut Joseph P. Campbell dalam Mutiarin, Dyah & Zaenudin, Arif (2014: 96) sudah relevan dengan topik atau fenomena masalah yang dibahas.

Keterkaitan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya berkenaan dengan topik serta permasalahan yang tengah terjadi saat ini. Dengan adanya penelitian tentang efektivitas ini, serta teori yang digunakan lebih relevan, maka penelitian ini akan lebih bisa menjawab permasalahan serta faktor yang mempengaruhi efektivitas pada Program Wirausaha Muda Pemula (WMP) di Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Hulu Sungai Utara.

B. Tinjauan Teoritis

1. Efektivitas

a. Definisi Efektivitas

Efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu “*effective*” yang berarti sesuatu hal yang dapat dilakukan secara berhasil dan baik. Menurut kamus besar Bahasa Indonesia, kata efektivitas berasal dari kata dasar “efektif” yang artinya ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesannya) manjur dan mujarab, dapat membawa keberhasilan. Sedangkan, secara istilah efektivitas merupakan suatu hasil tercapainya tujuan yang telah di usahakan.

Efektivitas adalah kemampuan untuk memilih tujuan-tujuan atau sasaran-sasaran yang tepat dan mencapainya. Karena itulah efektivitas merupakan hubungan antara *output* dengan tujuan, sesuai dengan pendapat Effendy dalam Sawir (2020: 125) yang mendefinisikan

efektivitas sebagai komunikasi yang prosesnya mencapai tujuan yang direncanakan sesuai dengan biaya yang dianggarkan, waktu yang ditetapkan dan jumlah personil yang ditentukan. Efektivitas menurut pengertian diatas mengartikan bahwa indikator efektivitas dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya merupakan sebuah pengukuran Dimana suatu target telah tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan.

Efektivitas menunjuk pada keberhasilan pencapaian sasaran-sasaran organisasional, sehingga efektivitas digambarkan sebagai suatu ukuran apakah manajer dapat mengerjakan pekerjaannya dengan benar. Sehingga efektivitas didefinisikan sebagai sejauh mana sebuah organisasi mewujudkan tujuan-tujuannya. Dalam konteks mencapai tujuan, maka efektivitas berarti *doing the right things* atau mengerjakan pekerjaan yang benar. Mahmudi dalam Sawir (2020: 126) mendefinisikan efektivitas sebagai berikut:

“Efektivitas merupakan hubungan antara *output* dengan tujuan, semakin besar kontribusi (sumbangan) *output* terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan. Efektivitas berfokus pada *outcome* (hasil), program, atau kegiatan yang dinilai efektif apabila *output* yang dihasilkan dapat memenuhi tujuan yang diharapkan atau dikatakan *spending wisely*.”

Menurut Mutiarin, Dyah & Zaenudin, Arif (2014: 13), efektivitas pada dasarnya mengacu pada sebuah keberhasilan atau pencapaian tujuan. Efektivitas merupakan salah satu dimensi dari produktivitas, yaitu mengarah kepada pencapaian tujuan untuk kerja

yang maksimal, yaitu pencapaian target yang berkaitan dengan kualitas, kuantitas, dan waktu.

Efektivitas terjadi pada suatu aspek atau akibat yang dikehendaki dalam suatu perbuatan dan untuk setiap program yang efisien. Efektivitas digunakan sebagai tolak ukur untuk membandingkan antara rencana dan proses yang dilakukan dengan hasil yang tercapai.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat penulis tarik kesimpulan bahwa efektivitas merupakan suatu tingkat keberhasilan yang dapat dihasilkan oleh seseorang ataupun suatu organisasi yaitu dengan cara tertentu sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai dan dengan semakin banyak rencana yang dilakukan berhasil, maka dengan itu kegiatan ataupun program dikatakan efektif.

b. Teori Efektivitas Menurut Para Ahli

Efektivitas sangatlah penting karena merupakan salah satu kriteria yang harus diperhatikan dalam organisasi publik. Dalam kaitan ini, maka berikut ini dikemukakan beberapa teori efektivitas menurut pendapat para ahli, yaitu:

1) Ndraha (2003) mengemukakan bahwa efektivitas organisasi merupakan tingkatan keberhasilan pencapaian tujuan (target). Oleh karena itu, efektivitas suatu program dapat dilihat dari sejauh mana tujuan program tersebut dapat tercapai serta memberikan manfaat bagi kelompok sasaran. Ndraha menjelaskan bahwa efektivitas dapat dilihat dari beberapa indikator, yaitu:

a) Pencapaian Tujuan

- b) Proses Pelaksanaan
 - c) Hasil atau *Output* Program
 - d) Dampak atau Manfaat
- 2) Gibson J. L., Ivancevich J. M., dan Donnelly J. H. (1996) dalam buku “Organisasi: Perilaku, Struktur, Proses”, mengemukakan bahwa efektivitas dalam konteks perilaku organisasi merupakan hubungan optimal antara produksi, kualitas, efisiensi, fleksibilitas, kepuasan, keunggulan, dan pengembangan. Gibson, *et al.* menjelaskan bahwa efektivitas organisasi dapat dianalisis melalui beberapa pendekatan utama, yaitu:
- a) Pendekatan Tujuan (*Goal Approach*)
 - b) Pendekatan Sistem (*System Approach*)
 - c) Pendekatan Konstituensi Strategis (*Strategic Constituencies Approach*)
- 3) Suit (1996) mengemukakan bahwa efektivitas adalah ketepatan suatu tindakan atau kesempurnaan (jaminan) hasil suatu pekerjaan itu sendiri. Suit menjelaskan bahwa efektivitas suatu program dapat dilihat dari beberapa indikator utama, yaitu:
- a) Ketepatan Sasaran Program
 - b) Sosialisasi Program
 - c) Pencapaian Tujuan Program
 - d) Pemantauan atau Monitoring Program
- 4) T. Hani Handoko (1995) dalam bukunya “Manajemen”, mengemukakan bahwa efektivitas adalah kemampuan untuk

memilih tujuan yang tepat atau peralatan yang tepat untuk pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas organisasi menurut Handoko dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu:

- a) Pencapaian Tujuan Organisasi
 - b) Ketepatan Strategi atau Cara Pelaksanaan
 - c) Kemampuan Organisasi dalam Melaksanakan Tugas
 - d) Hasil Kerja yang dicapai
- 5) Pabundu Tika (2014) dalam bukunya “Budaya Organisasi dan Peningkatan Kinerja Perusahaan”, mengemukakan bahwa efektivitas merujuk pada kaitan antara *output* atau apa yang sudah dicapai atau hasil yang sesungguhnya dicapai dengan tujuan atau apa yang sudah ditetapkan dalam rencana atau hasil yang diharapkan. Suatu organisasi dikatakan efektif jika *output* yang dihasilkan bisa memenuhi tujuan yang diharapkan. Efektivitas suatu organisasi atau program menurut Tika dapat dilihat dari beberapa indikator, yaitu:
- a) Pencapaian Tujuan Organisasi
 - b) Ketepatan Pelaksanaan Program
 - c) Pemanfaatan Sumber Daya secara Optimal
 - d) Hasil atau *Output* yang diperoleh dari Kegiatan
- 6) Campbell J. P. dalam Mutiarin, Dyah & Zaenudin, Arif (2014) dalam bukunya “Manajemen Birokrasi dan Kebijakan” mengemukakan bahwa efektivitas organisasi merupakan tingkat keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas menunjukkan sejauh mana program, kegiatan, atau organisasi

mampu menghasilkan hasil sesuai dengan target yang telah direncanakan. Campbell menjelaskan bahwa efektivitas organisasi bersifat multidimensi, sehingga untuk mengukurnya diperlukan beberapa indikator yang dapat menggambarkan keberhasilan organisasi secara menyeluruh. Mutiarin, Dyah & Zaenudin, Arif (2014: 96) mengemukakan bahwa efektivitas organisasi menurut Campbell dapat diukur melalui beberapa indikator, yaitu:

- a) Keberhasilan Program
 - b) Keberhasilan Sasaran
 - c) Kepuasan Terhadap Program
 - d) Tingkat *Input* dan *Output*
 - e) Pencapaian Tujuan Menyeluruh
- 7) Prihartono (2012) mengemukakan bahwa efektivitas merupakan tingkat keberhasilan suatu organisasi atau program dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan rencana. Efektivitas menunjukkan sejauh mana hasil yang diperoleh dari suatu kegiatan dapat memenuhi target atau sasaran yang telah direncanakan sebelumnya. Dengan demikian, suatu kegiatan atau program dapat dikatakan efektif apabila tujuan yang telah ditentukan dapat tercapai serta memberikan manfaat bagi pihak yang menjadi sasaran program. Prihartono menjelaskan bahwa efektivitas suatu program dapat dilihat melalui beberapa indikator, yaitu:
- a) Ketepatan Sasaran

- b) Sosialisasi Program
- c) Pencapaian Tujuan Program
- d) Pemantauan atau Evaluasi Program

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli mengenai teori-teori efektivitas yang telah diuraikan di atas, dalam penelitian ini penulis menggunakan teori efektivitas menurut Campbell J.P. dalam Mutiarin, Dyah & Zaenudin, Arif (2014).

Alasan dibalik pemilihan teori Campbell J.P. sebagai fokus penelitian disini karena teori ini memiliki indikator yang lebih jelas dan relevan untuk mengukur efektivitas Program Wirausaha Muda Pemula (WMP). Indikator dari teori Campbell J.P. pun dianggap relevan dan dapat menjawab fenomena masalah yang penulis angkat. Adapun indikator yang digunakan meliputi:

- 1) Keberhasilan Program
- 2) Keberhasilan Sasaran
- 3) Kepuasan Terhadap Program
- 4) Tingkat Input Dan Output
- 5) Pencapaian dan Tujuan Secara Menyeluruh

c. Ukuran Efektivitas

Pengukuran efektivitas disini dinilai dari keberhasilan sistem mencapai tujuan. Efektivitas merupakan suatu ukuran yang memberikan gambaran seberapa jauh target yang telah ditetapkan sebelumnya oleh Lembaga atau organisasi dapat tercapai. Target tersebut sangat penting pada setiap Lembaga atau organisasi dan berguna untuk melihat

perkembangan dan kemajuan yang dicapai oleh suatu Lembaga atau organisasi itu sendiri.

Menurut Campbell J. P. dalam Mutiarin, Dyah & Zaenudin, Arif (2014: 96), terdapat cara umum untuk pengukuran efektivitas yaitu sebagai berikut:

a) Keberhasilan Program

Keberhasilan program menurut Campbell J. P. merupakan pengukuran efektivitas dalam arti tercapainya tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Keberhasilan program dapat ditinjau dari proses dan mekanisme suatu kegiatan yang dilakukan dilapangan. Lalu keberhasilan program dapat dijalankan dengan kemampuan operasional dalam melaksanakan program kerja yang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

b) Keberhasilan Sasaran

Keberhasilan sasaran merupakan pengukuran efektivitas ditinjau dari sudut pencapaian tujuan, dimana keberhasilan suatu organisasi harus mempertimbangkan bukan saja sasaran organisasi mekanisme tetapi juga mempertahankan sasaran. Dengan kata lain, penilaian efektivitas harus berkaitan dengan masalah sasaran maupun tujuan. Artinya efektivitas dapat diukur dengan seberapa jauh tingkat sasaran dalam program atau kebijakan dari pemerintah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

c) Kepuasan terhadap Program

Menurut Campbell J. P., kepuasan merupakan kriteria efektivitas mengacu pada keberhasilan program dalam memenuhi kebutuhan penerima program tersebut. Kepuasan dirasakan oleh para penerima terhadap kualitas program yang diterima. Semakin berkualitas program yang diberikan maka kepuasan yang dirasakan oleh penerima semakin tinggi, maka dapat menimbulkan penilaian yang baik terhadap pembuat dan pelaksana program atau kebijakan tersebut dalam hal ini pemerintah.

d) Tingkat *Input* dan *Output*

Menurut Campbell J. P., pada efektivitas tingkat input dan output dapat dilihat dari perbandingan antara masukan (*input*) dengan keluaran (*output*). Jika output lebih besar dari input maka dapat dikatakan efisien dan sebaliknya jika input lebih besar dari output maka dapat dikatakan tidak efisien.

e) Pencapaian dan Tujuan Menyeluruh

Indikator efektivitas pengukuran terakhir yaitu pencapaian tujuan menyeluruh dimana menurut Campbell J. P. bisa dilihat dari sejauh mana organisasi melaksanakan tugasnya untuk mencapai tujuan. Pencapaian dan tujuan menyeluruh disini dimaksudkan dengan sejauh mana organisasi melakukan tugasnya untuk mencapai suatu tujuan. Dalam hal ini merupakan penilaian umum dengan banyak kriteria dan menghasilkan penilaian umum efektivitas organisasi.

Dari penjelasan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa setiap kegiatan yang akan dikerjakan dan dilaksanakan haruslah sesuai dengan rencana yang ada, dan sesuai dengan prosedur dan indikator yang berlaku agar segera apa yang menjadi tujuan dapat dicapai secara efektif dan efisien.

d. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas

Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas menurut Sutarto dalam Tangkilisan (2005) yaitu faktor internal dan faktor eksternal.

1) Faktor Internal

Faktor internal disini meliputi sebagai keseluruhan faktor yang ada dan berkaitan dengan organisasi itu sendiri, seperti terdapatnya sekelompok orang yang melakukan aktifitas Kerjasama untuk mencapai tujuan tertentu bersama. Faktor-faktor itu saling mempengaruhi dan diuraikan dengan beberapa asas-asas penting didalamnya sebagai berikut:

- a) Departemenisasi, atau kegiatan menyusun satuan-satuan organisasi;
- b) Fleksibilitas, atau keadaan dimana struktur organisasi mudah diubah untuk disesuaikan dengan tuntutan dan kebutuhan yang datangnya dari lingkungan organisasi;
- c) Rentangan kontrol, atau banyaknya satuan bawahan langsung yang dapat dipimpin dengan baik oleh atasan;

- d) Berkelangsungan, atau kondisi dimana organisasi memberikan dukungan dengan berbagai sumber daya yang dimiliki agar aktifitas organisasi berjalan terus;
- e) Kepemimpinan (*leading*), yaitu proses pemerintah dan mempengaruhi agar kegiatan atau pekerjaan yang saling terkait dapat diarahkan untuk mencapai tujuan organisasi; dan
- f) Keseimbangan, merupakan satuan-satuan organisasi yang ditempatkan pada struktur organisasi sesuai dengan perannya.

2) Faktor Eksternal

Faktor eksternal mencakup suatu jaringan hubungan-hubungan pertukaran dengan sejumlah organisasi dan melibatkan diri dengan transaksi-transaksi dengan tujuan untuk memperoleh dukungan, mengatasi hambatan, melakukan pertukaran sumber daya, menata lingkungan organisasi yang konduktif dan proses transformasi nilai inovasi maupun norma sosial yang ada.

Menurut Jones dalam Tangkilisan (2005) mengemukakan tiga faktor yang mempengaruhi efektivitas organisasi maupun norma-norma sosial yang ada dijelaskan sebagai berikut:

- a) Lingkungan Organisasi, dimana organisasi beroperasi selalu berhadapan dengan sistem yang tidak menentu bagi yang meliputi dukungan pelanggan, contohnya seperti pemasok bahan-bahan minuman tantangan dari pelaku yang lain;
- b) Lingkungan Teknologi, dimana organisasi dapat bertahan jika mampu memberikan pelayanan dan produk yang sebaik-baiknya

dan untuk mencapai hal itu maka dibutuhkan penyesuaian yang tepat guna;

- c) Proses Organisasi, dimana organisasi akan mampu berkembang dan bersaing bila menerapkan strategi yang tepat untuk keluar dari suatu krisis yang mendalam.

2. Program

a. Definisi Program

Program didefinisikan sebagai suatu rancangan, struktur, desain, kode skema, maupun bentuk lainnya yang disusun sesuai alur algoritma dengan tujuan mempermudah penyelesaian suatu permasalahan. Sebuah program disebut juga dengan istilah aplikasi yang tujuannya adalah untuk mempermudah suatu hal agar pekerjaan bisa lebih produktif, efektif dan efisien.

Program merupakan sebuah pernyataan yang berisi kesimpulan dari beberapa harapan atau tujuan yang saling bergantung dan saling terkait, untuk mencapai suatu sasaran dan/atau tujuan yang sama. Biasanya suatu program mencakup seluruh kegiatan yang berada dibawah unit administrasi yang sama, atau sasaran-sasaran yang saling bergantung dan saling melengkapi, yang semuanya harus dilaksanakan secara bersamaan atau berurutan.

Munthe (2015) mendefinisikan program sebagai rangkaian kegiatan atau aktivitas terencana yang sistematis dalam sebuah organisasi untuk diimplementasikan dalam kegiatan nyata dan berkelanjutan yang melibatkan banyak orang.

Tayibnapis (2008) menyebutkan bahwa program ialah segala sesuatu yang dilakukan oleh seseorang dengan harapan dan tujuan untuk membawakan hasil atau pengaruh.

Sedangkan Arikunto, *et al.* (2009) dalam Munthe (2015) menyebutkan ada dua definisi terhadap istilah program yaitu dalam arti umum dan arti khusus. Secara umum, program diartikan sebagai sebuah rencana yang akan dilaksanakan. Sedangkan secara khusus, program diartikan sebagai kumpulan kegiatan yang dilakukan oleh sebuah organisasi yang melibatkan orang banyak yang merupakan bentuk implementasi dari sebuah kebijakan yang berlangsung dalam kesinambungan proses.

Arikunto, *et al.* dalam Muthe (2015) lebih lanjut menjelaskan bahwa terdapat tiga makna penting yang perlu ditekankan dalam menentukan program yaitu:

- 1) Bentuk implementasi dari sebuah kebijakan atau aturan.
- 2) Kegiatan jamak yang dilakukan dalam jangka waktu relatif panjang dan berkelanjutan.
- 3) Terjadi di suatu organisasi dengan mengikutsertakan sekelompok orang.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa program merupakan kumpulan kegiatan atau aktivitas yang disusun dengan sistematis dalam suatu organisasi atau lembaga yang melibatkan sekelompok orang untuk diimplementasikan dalam kegiatan nyata dan berkelanjutan dengan

harapan dan tujuan untuk membawakan hasil atau pengaruh yang baik bagi penerima manfaat.

b. Faktor yang Mempengaruhi Program

Keban (2004: 35) mengemukakan beberapa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan suatu program dijelaskan sebagai berikut:

1) Organisasi

Organisasi pelaksanaan program diharuskan memiliki struktur organisasi, adanya sumber daya manusia yang berkualitas sebagai tenaga pelaksana, dan perlengkapan atau alat alat kerja, serta didukung dengan perangkat atau dasar hukum yang jelas.

Sumber daya manusia yang berkualitas berkaitan dengan kemampuan aparatur dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Aparatur dalam hal ini petugas yang terlibat dalam pelaksanaan program. Tugas aparat pelaksana program yang utama adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat yang dipercayakan kepadanya untuk mencapai tujuan negara. Agar tugas-tugas pelaksana program dapat dilaksanakan secara efektif maka setiap aparatur dituntut memiliki kemampuan yang memadai sesuai dengan bidang tugasnya.

2) Interpretasi

Interpretasi dilakukan agar program dapat terlaksana sesuai dengan peraturan atau ketentuan yang berlaku, harus dilihat apakah pelaksanaannya telah sesuai dengan petunjuk pelaksana dan

petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dengan penyesuaian sebagai berikut:

- a) Sesuai dengan peraturan, yang berarti setiap pelaksanaan kebijaksanaan harus sesuai dengan peraturan yang berlaku baik Peraturan Tingkat Pusat, Provinsi, serta Kabupaten.
- b) Sesuai dengan petunjuk pelaksana, yang berarti pelaksanaan kebijaksanaan dari peraturan sudah dijabarkan cara pelaksanaannya pada kebijaksanaan yang bersifat administratif, sehingga memudahkan pelaksana dalam melakukan aktifitas pelaksanaan program.
- c) Sesuai dengan petunjuk teknis, yang berarti kebijaksanaan yang sudah dirumuskan dalam bentuk petunjuk pelaksana dirancang lagi secara teknis agar memudahkan dalam operasionalisasi program. Petunjuk teknis ini bersifat strategis lapangan agar dapat berjalan efisien dan efektif, rasional dan realistik.

3) Penerapan

Penerapan program harus sesuai dengan peraturan/kebijakan berupa petunjuk pelaksana dan teknis telah berjalan sesuai dengan ketentuan, yang dijelaskan sebagai berikut:

- a) Prosedur kerja yang jelas agar dalam pelaksanaannya tidak terjadi tumpang tindih, sehingga tidak bertentangan antara unit kegiatan yang terdapat di dalamnya.

- b) Program kerja yang harus sudah terprogram dan terencana dengan baik, sehingga tujuan program dapat direalisasikan dengan efektif.
- c) Jadwal kegiatan program yang sudah dijadwalkan kapan dimulai dan diakhiri suatu program agar mudah dalam mengadakan evaluasi. Dalam hal ini yang diperlukan adanya tanggal pelaksanaan dan rampungnya sebuah program sudah ditentukan sebelumnya.

3. Efektivitas Program

a. Definisi Efektivitas Program

Efektivitas program merupakan suatu cara untuk mengukur sejauh mana suatu program berjalan guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Makmur, Agus & Aspia, Asrar (2015: 6) berpendapat bahwa efektivitas program merupakan kegiatan yang pelaksanaannya menampakkan ketepatan antara harapan yang kita inginkan dengan hasil yang di capai, dimana ditunjukkan dengan ketepatan harapan, implelementasi, dan hasil yang di capai. Berdasarkan pernyataan diatas, dapat disimpulkan bahwa efektivitas program adalah tingkat perwujudan dari perumusan tujuan yang ditentukan oleh suatu kelompok, dimana didalamnya terdapat tugas-tugas pokok.

Menurut Makmur, Agus & Aspia, Asrar (2015: 7), efektivitas dapat dilihat dari beberapa segi kriteria, sebagai berikut:

- 1) Ketepatan perhitungan biaya

Berkaitan dengan ketepatan pemanfaatan biaya, tidak mengalami kekurangan juga sebaliknya tidak mengalami kelebihan biaya sampai kegiatan dapat dilaksanakan dan diselesaikan dengan baik.

2) Ketepatan berpikir

Ketepatan berpikir akan melahirkan keefektifan, sehingga kesuksesan yang senantiasa diharapkan melalui tenaga kerja yang menjalankan tugas dengan baik dan melakukan suatu bentuk kerjasama yang dapat memberikan hasil maksimal.

3) Ketepatan tujuan

Ketepatan tujuan merupakan aktivitas organisasi untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Tujuan yang ditetapkan secara tepat, akan sangat menunjang efektivitas pelaksanaan kegiatan terutama yang berorientasi kepada jangka panjang.

4) Ketepatan sasaran

Penentuan sasaran yang tepat baik, yang ditetapkan secara individu maupun secara organisasi sangat menentukan keberhasilan aktivitas organisasi. Sasaran yang kurang tepat, akan menghambat e

Menurut Suharto dalam Ekardo et al., (2014: 7) menjelaskan bahwa faktor yang mempengaruhi efektivitas program terdiri dari 4 (empat) kriteria, sebagai berikut:

1) Sasaran

2) Koordinasi

- 3) Sosialisasi
- 4) Jumlah bantuan

Sedangkan menurut Budiani dalam bukunya “*Efektivitas Program*” yang dikutip oleh Mayssara, A. H. S. A (2014) menyatakan bahwa untuk mengukur faktor apa yang bisa mempengaruhi berlakunya suatu program sehingga dapat diukur melalui beberapa variabel berikut yaitu:

- 1) Ketetapan sasaran suatu program yaitu dilihat dari sejauh mana seorang peserta dalam program dapat tepat menerima sasaran program.
- 2) Sosialisasi program dapat dilakukan sosialisasi program dalam rangkai menyampaikan informasi kepada warga mengenai program agar dapat memberikan pemahaman kepada Masyarakat sehingga program tersebut dapat tepat sasaran.
- 3) Tujuan program adalah kesesuaian antara suatu hasil dari pelaksanaan suatu program dengan tujuan dari program.
- 4) Pemantauan program yaitu suatu kegiatan dilakukan setelah dilaksanakannya program yang telah ditetapkan sebelumnya sebagai bentuk perhatian kepada peserta program.

Siagian (2015: 34) turut mengemukakan faktor yang mempengaruhi efektivitas program, yaitu sebagai berikut:

- 1) Kejelasan tujuan
- 2) Kejelasan strategi pencapaian tujuan
- 3) Proses analisis dan penetapan kebijakan yang mantap

- 4) Perencanaan
- 5) Penyusunan program yang tepat
- 6) Tersedianya sarana dan prasarana kerja
- 7) Pelaksanaan yang efektif dan efisien
- 8) Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik

Berbeda dengan Ripley dalam Joyo (2017: 4) yang menyatakan faktor yang mempengaruhi kriteria efektivitas ialah sebagai berikut:

- 1) Akses
- 2) Cakupan
- 3) Frekuensi
- 4) Bias
- 5) Ketepatan Layanan
- 6) Akuntabilitas
- 7) Kesesuaian program

4. Program Wirausaha Muda Pemula (WMP)

a. Definisi Program Wirausaha Muda Pemula (WMP)

Wirausaha Muda Pemula atau biasa disingkat menjadi WMP merupakan program dari Kementerian Pemuda dan Olahraga yang diharapkan dapat memacu motivasi dan semangat kalangan pemuda untuk terus meningkatkan produktivitasnya melalui kegiatan kewirausahaan. Program ini berupaya untuk menciptakan wirausaha baru, serta menumbuhkan kesadaran dan minat berwirausaha terutama di kalangan pemuda sekarang.

Program Wirausaha Muda Pemula (WMP) memiliki tujuan sebagai berikut:

- 1) Memilih Wirausaha Muda Pemula (WMP) berprestasi dalam menjalankan dan mengelola usahanya hingga tumbuh dan berkembang menjadi usaha mandiri yang berdaya saing.
- 2) Memilih penggerak wirausaha muda yang telah menunjukkan dedikasi dan komitmen tinggi dalam melakukan pembinaan kepada wirausaha muda dan telah menghasilkan wirausaha muda yang mandiri dan berdaya saing.
- 3) Membangun *image* positif wirausaha dalam masyarakat, sehingga muncul semangat dan keyakinan dalam menjalankan usaha sebagai pilihan karir.

Kegiatan ini direncanakan dapat dilaksanakan setiap tahun untuk memberikan apresiasi dan penghargaan kepada Wirausaha Muda Pemula yang telah bekerja keras merintis kegiatan kewirausahaan serta menciptakan lingkungan wirausaha, sehingga mampu untuk menggerakkan pemuda lainnya dalam memberikan manfaat bagi lingkungan dan komunitas sekitarnya.

Dalam sasaran programnya, pemilihan Wirausaha Muda Pemula dikelompokkan dalam 4 (empat) bidang usaha, yaitu:

- 1) Industri Kreatif, yaitu kegiatan usaha yang berdasarkan pada kreativitas, keterampilan, dan bakat individu untuk menciptakan daya kreasi dan daya cipta yang bernilai ekonomis dan berpengaruh pada kesejahteraan masyarakat yang meliputi periklanan, arsitektur,

pasar seni, dan barang antik, kerajinan., desain, fashion (*mode*), film, video, dan fotografi, permainan interaktif seperti musik, seni pertunjukkan, penerbitan dan percetakan.

- 2) *Technopreuner*, merupakan seorang wirausaha yang mengerjakan atau menjalankan bisnis berdasarkan kecakapan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi atau dapat diartikan juga sebagai peminat/pecinta teknologi yang memiliki jiwa *entrepreneur* atau berjiwa bisnis yang tinggi. Seperti perusahaan teknologi *e-commerce*, Informasi Teknologi, dll.
- 3) *Sociopreuner* atau wirausaha sosial, adalah orang yang mengetahui atau memahami adanya masalah sosial di masyarakat. Selanjutnya dengan menggunakan prinsip-prinsip kewirausahaan, mereka mengorganisasi, mengkreasi, dan mengelola potensi yang ada untuk membuat perubahan sosial. Dalam arti lain wirausaha muda yang mempunyai perhatian penuh terhadap pengembangan masyarakat di lingkungannya dan mampu memberdayakannya untuk menghasilkan satu perubahan sosial yang berujung pada kesejahteraan bersama. Jenis-jenis usaha *sociopreuner* sangat beragam, mulai dari lingkungan, kesehatan, pendidikan, dan lain lain.
- 4) *Religiopreneur*, adalah wirausaha muda kreatif dan inovatif dalam menciptakan, menjalankan, serta menambah nilai suatu produk baik barang ataupun jasa di bidang keagamaan dengan tujuan meningkatkan kemudahan praktek dan pengamalan nilai-nilai

keagamaan. Usaha yang dimaksud dalam bidang *Religiopreneur* seperti bisnis travel/wisata religi, kursus keterampilan dan keagamaan, jasa penyelenggaraan kegiatan peribadatan, penyediaan perlengkapan peribadatan, konsultasi keagamaan, dan lain-lain.

b. Dasar Hukum Program Wirausaha Muda Pemula (WMP)

Program Wirausaha Muda Pemula (WMP) merupakan implementasi dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan khususnya berkaitan dengan pengembangan kewirausahaan. Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan mengisyaratkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertugas mengembangkan kewirausahaan di kalangan pemuda.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 menjadi dasar utama kebijakan pembangunan kepemudaan di Indonesia dengan beberapa poin penting:

- 1) Pemerintah berkewajiban memberdayakan pemuda dalam bidang ekonomi dan kewirausahaan.
- 2) Pemuda didorong untuk menjadi mandiri, kreatif, dan produktif melalui berbagai program pemberdayaan.
- 3) Pemerintah dapat memberikan fasilitasi, pelatihan, dan bantuan modal usaha bagi pemuda.

Setelah itu, turunlah Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda yang mengatur lebih lanjut mengenai pengembangan kewirausahaan pemuda. Program Wirausaha Muda Pemula (WMP) merupakan salah

satu bentuk implementasi dari kebijakan pengembangan kewirausahaan pemuda yang diatur melalui Peraturan Pemerintah (PP) tersebut.

Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 Pasal 19, pengembangan kewirausahaan pemuda dapat dilaksanakan melalui:

- 1) Pelatihan
- 2) Pemagangan
- 3) Pembimbingan
- 4) Pendampingan
- 5) Kemitraan
- 6) Promosi
- 7) Bantuan akses permodalan.

Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan masing-masing memfasilitasi pelatihan, pemagangan, pembimbingan, dan pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 melalui:

- 1) Penyediaan instruktur atau fasilitator, dan tenaga pendamping
- 2) Pengembangan kurikulum
- 3) Pendirian inkubator kewirausahaan pemuda
- 4) Penyediaan prasarana dan sarana
- 5) Penyediaan pendanaan.

Selanjutnya, disetiap tahunnya diterbitkan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga atau Petunjuk Teknis (Juknis) bantuan pemerintah yang mengatur Program Wirausaha Muda Pemula (WMP). Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga (Permenpora) tentang Bantuan Pemerintah Kewirausahaan Pemuda berisikan mekanisme program

WMP, persyaratan peserta, proses seleksi, besaran bantuan modal, dan pelaporan dan pertanggungjawaban bantuan.

c. Pelaksanaan Program Wirausaha Muda Pemula (WMP)

Pelaksanaan merupakan kelanjutan dari perencanaan program. Setelah perencanaan program telah ditetapkan, selanjutnya program dilaksanakan dengan acuan dari perencanaan tersebut. Jadi, pelaksanaan program merupakan serangkaian kegiatan yang telah direncanakan untuk mencapai tujuan program dan kemudian dilaksanakan sesuai dengan perencanaan yang disepakati.

Pelaksanaan Program Wirausaha Muda Pemula (WMP) pada Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata dilaksanakan melalui beberapa tahapan seperti tahap sosialisasi, tahap penyeleksian peserta program, tahap pelatihan kewirausahaan, tahap pemberian bantuan modal usaha, serta tahap monitoring dan evaluasi.

1) Tahap Sosialisasi

Tahapan pertama yaitu sosialisasi program yang dilakukan kepada masyarakat khususnya kalangan pemuda. Sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan informasi terkait tujuan program, persyaratan pendaftaran, serta mekanisme pelaksanaan kegiatan. Kegiatan sosialisasi biasanya dilakukan melalui media sosial, website resmi, serta penyampaian langsung ke masyarakat.

Adapun persyaratan peserta program Wirausaha Muda Pemula (WMP) terbuka bagi pemuda dengan kriteria menurut Dinas

Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Hulu Sungai Utara sebagai berikut:

- a) Berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun.
- b) Berdomisili di Kabupaten Hulu Sungai Utara.
- c) Memiliki usaha secara perorangan yang telah berjalan minimal 2 (dua) tahun (dibuktikan dengan laporan keuangan).
- d) Bisnis/usaha yang dijalankan legal dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e) Belum pernah menerima penghargaan sejenis dari Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata tingkat Kabupaten dan Provinsi Kalimantan Selatan.
- f) Peserta diwajibkan mengikuti seluruh rangkaian kegiatan dan tidak dapat diwakilkan.
- g) Peserta mengirimkan proposal singkat mengenai bisnis atau usahanya.

2) Tahap Penyeleksian

Tahap berikutnya yaitu tahap penyeleksian bakal calon peserta Program Wirausaha Muda Pemula (WMP). Pada tahap ini, calon peserta yang telah mendaftar akan diseleksi berdasarkan persyaratan yang telah ditentukan dan dijelaskan ditahap sebelumnya. Proses penyeleksian peserta dilakukan melalui seleksi administrasi.

Setelah selesai melakukan tahap penyeleksian peserta-peserta, para bakal calon peserta akan dihubungi untuk

pemberitahuan terkait pelaksanaan, petunjuk teknis (juknis), apa-apa saja yang perlu disiapkan sebelum pelaksanaan program, serta sedikit pembekalan yang diberikan oleh para pegawai Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Hulu Sungai Utara.

3) Tahap Pelatihan

Tahap berikutnya, peserta yang lolos seleksi dan telah mengikuti pembekalan dari Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Hulu Sungai Utara akan mengikuti tahapan pelatihan kewirausahaan. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan peserta dalam menjalankan usaha, seperti manajemen usaha, pemasaran, pengelolaan keuangan, inovasi produk, digitalisasi produk usaha, dan banyak materi lainnya terkait pengembangan kewirausahaan.

4) Tahap Pemberian Bantuan Modal Usaha

Tahap berikutnya adalah pemberian bantuan modal usaha kepada peserta yang telah mengikuti pelatihan kewirausahaan. Bantuan ini diberikan sebagai stimulus untuk mendukung peserta dalam memulai atau mengembangkan usaha yang telah direncanakan.

Sedangkan untuk alokasi anggaran paket bantuan yang diberikan pemerintah bagi peserta Program Wirausaha Muda Pemula (WMP) sesuai dengan Peraturan Deputi Bidang Pengembangan Pemuda Nomor 10.23.138 Tahun 2023 tentang

Perubahan Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Bagi Wirausaha Muda Pemula, *Sociopreneur*, dan Sentra Kewirausahaan Pemuda, penyaluran bantuan pemerintah bagi wirausaha muda pemula adalah maksimal senilai Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

5) Tahap Monitoring dan Evaluasi.

Tahap monitoring dan pendampingan usaha dilakukan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 Pasal 19. Pendampingan ini bertujuan untuk memastikan bahwa usaha yang dijalankan peserta dapat berkembang serta untuk mengatasi kendala yang dihadapi selama proses usaha berlangsung.

Tahap terakhir adalah evaluasi program, yang dilakukan untuk menilai keberhasilan pelaksanaan Program Wirausaha Muda Pemula (WMP) pada Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Hulu Sungai Utara. Evaluasi ini mencakup penilaian terhadap perkembangan usaha peserta, efektivitas pelaksanaan kegiatan, serta dampak program terhadap peningkatan kewirausahaan pemuda.

C. Kerangka Pemikiran

Kerangka berpikir menurut Sugiyono (2019) merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Seorang peneliti harus menguasai teori-teori ilmiah sebagai dasar dari argumentasi dalam menyusun kerangka pemikiran yang membuahkan hipotesis. Kerangka pemikiran ini

merupakan penjelasan sementara terhadap gejala-gejala yang menjadi objek permasalahan.

Berdasarkan hasil dari pembahasan di atas, maka dapat dikatakan bahwa Efektivitas Program Wira Muda Pemula (WMP) Pada Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Kabupaten Hulu Sungai Utara sangat penting dan diperlukan.

Permasalahan-permasalahan yang terdapat pada proses Efektivitas Program Wira Muda Pemula (WMP) Pada Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Kabupaten Hulu Sungai Utara sekiranya dapat diminimalisirkan mengacu pada teori yang telah dijelaskan pada tinjauan teoritis sebelumnya maka untuk melengkapi kerangka konsep pada penelitian ini, penulis berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda dan teori efektivitas menurut Joseph P. Campbell dalam Mutiarin, Dyah & Zaenudin, Arif (2014: 96). Berikut ini adalah gambaran kerangka pemikiran dalam penelitian yang telah penulis susun, yaitu sebagai berikut:

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

